



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAS HANDANI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 716473

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m²/19 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m²/22.3 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 232.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. MOBIL, MITSHUBITSHI PICK UP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.394.618

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.508.394.618



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.408.394.618

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.